

HUBUNGAN PERSEPSI POTENSI KORUPSI DENGAN INTEGRASI BISNIS, INTEGRASI PUBLIK DAN SISTEM INTEGRASI LOKAL (ANALISA DATA DARI SURVEI PERSEPSI KORUPSI)

Santi Lina Siregar
santilina@gmail.com

Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha
Jalan Prof. Drg. Surya Sumantri No.65, Sukawarna, Bandung, Jawa Barat 40164

ABSTRACT

Corruption Potential is a condition that allows corruption to occur. This paper aims to see whether perceptions of potential corruption have a relationship with business integrity, public integrity, local integrity systems, and economic growth. The research method used is descriptive analysis by looking at the relationship between variables using rank and Rank Spearman test. The results indicate that perceptions of potential corruption have links with local integration systems, local integration systems have a relationship with the perception of business integrity, and the perception of integrity has a business relationship with public integrity. Thus there are findings that the eradication of corruption can not be initiated from public integrity but must be initiated by the improvement of a clean system.

Keywords: Corruption Potential, Corruption Perception Survey, Business Integration, Public Integration, Local Integration System.

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan penyalahgunaan wewenang untuk tujuan memperoleh manfaat untuk kepentingan pribadi yang sangat merugikan masyarakat dan negara. Dalam rangka mempercepat upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) jangka menengah tahun 2012-2014 dan jangka panjang tahun 2012-2025. Sebagai tindak lanjut atas rumusan Stranas PPK Pemerintah menyusun Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang diimplementasikan dan dievaluasi setiap tahun. Dalam rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi (Renaksi PPK) tersebut Presiden secara tegas menginstruksikan kepada semua jajaran pemerintahan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota) untuk mengimplementasikan Stranas PPK. Dalam konteks Stranas PPK, daerah memiliki kewenangan dan aksi yang berbeda dengan nasional, sehingga menyediakan alat tera dampak implementasi aksi Stranas PPK dirasa perlu untuk mengukur risiko dan efektivitas Stranas PPK daerah. Pemberantasan dan pencegahan korupsi daerah dinilai berhasil jika terjadi kenaikan pada Indeks Persepsi Korupsi-Indonesia dan Sistem Integritas Lokal-Indonesia. (Transparency International Indonesia, 2015)

Paper ini bertujuan untuk melihat apakah persepsi potensi memiliki hubungan dengan integritas bisnis, integritas publik, dan sistem integritas lokal. Dengan pengukuran persepsi korupsi ini, ingin membuktikan bahwa korupsi tidak hanya masalah bagi kemudahan berusaha, mendistorsi daya saing lokal, menurunkan integritas publik, dan menurunkan integritas bisnis.

2. LANDASAN TEORI

Terdapat ada tiga fenomena utama yang tercakup dalam istilah korupsi pada negara-negara Asia Tenggara yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extortion*), dan nepotisme (*nepotism*). Penyuapan terjadi apabila seorang pegawai pemerintah menerima imbalan yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan si pemberi.

Pemerasan merupakan permintaan pemberian-pemberian atau hadiah dalam pelaksanaan tugas-tugas publik, termasuk pejabat-pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi keuntungan mereka sendiri atau mereka yang bersalah melakukan penggelapan di atas harga yang harus dibayar oleh publik. Nepotisme merupakan pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau rekan-rekan politik pada jabatan-jabatan publik tanpa memandang jasa mereka atau konsekuensinya pada kesejahteraan publik. (BPS, 2012)

Badan Pusat Statistik (BPS) menuliskan akar kultural korupsi adalah:

- Adanya tradisi pemberian hadiah, oleh-oleh atau semacam itu kepada pejabat pemerintah. Tindakan seperti itu di Eropa atau Amerika Utara bisa dianggap korupsi sebagai bentuk pemenuhan kewajiban oleh kawula kepada gustinya.
- Ikatan keluarga dan kesetiaan parokial di masyarakat ketimuran seperti Indonesia masih dipandang sangat penting. Kewajiban seseorang pertama-tama adalah memperhatikan saudara terdekat, kemudian trah atau sesama etniknya. Pada budaya semacam ini apabila ada seseorang yang mendatangi saudaranya yang pejabat untuk meminta perlakuan khusus sulit untuk ditolak. Penolakan bisa diartikan sebagai pengingkaran terhadap kewajiban tradisional, tetapi menuruti permintaan berarti mengingkari norma-norma hukum formal yang berlaku. Sehingga selalu terjadi konflik nilai, yaitu antara norma budaya atau norma hukum formal.

Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulistyantoro, korupsi seharusnya hanya dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah dan logika lurus hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi (Sulistyantoro, 2004).

Pendapat lain menyatakan bahwa kurangnya gaji dan pendapatan pegawai negeri memang merupakan faktor yang paling menonjol dalam arti menyebabkan merata dan meluasnya korupsi di Indonesia dikemukakan pula oleh Guy J. Pauker (1979) yang menyatakan sebagai berikut: *Although corruption is widespread in Indonesia as means of supplementing excessively low governmental salaries, the resources of the nation are not being used primarily for the accumulation of vast private fortunes, but for economic development and some silent, for welfare.*

Pendapat ini diperkuat oleh Schoorl yang menyatakan bahwa di Indonesia dibagian pertama tahun enam puluhan, situasinya begitu merosot, sehingga untuk golongan terbesar dari pegawai gaji sebulan hanya sekedar cukup untuk makan dua minggu. Dapat dipahami, bahwa dengan situasi demikian para pegawai terpaksa mencari penghasilan tambahan dan bahwa banyak diantara mereka mendapatkannya dengan meminta uang ekstra (Hamzah, 1995).

Hal demikian diungkapkan pula oleh KPK dalam buku Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (KPK, 2006), bahwa sistem penggajian kepegawaian sangat terkait dengan kinerja aparatur pemerintah. Tingkat gaji yang tidak memenuhi standar hidup minimal pegawai merupakan masalah sulit yang harus dituntaskan penyelesaiannya. Aparatur pemerintah yang merasa penghasilan yang diterimanya tidak sesuai dengan kontribusi yang diberikannya dalam menjalankan tugas pokoknya tidak akan dapat secara optimal melaksanakan tugas pokoknya.

Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi, diantaranya adalah kekuasaan pemerintah yang dibarengi dengan faktor kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk memenuhi kekayaan mereka dan kroninya. Terkait faktor ekonomi dan terjadinya korupsi, banyak pendapat menyatakan bahwa kemiskinan merupakan akar masalah korupsi. Pernyataan demikian tidak benar sepenuhnya, sebab banyak korupsi yang dilakukan oleh pemimpin Asia dan Afrika, dan mereka tidak tergolong orang miskin. Dengan demikian korupsi bukan disebabkan oleh kemiskinan, tapi justru sebaliknya, kemiskinan disebabkan oleh korupsi (Pope, 2003).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan pada studi ini adalah analisa deskriptif dengan melihat hubungan antar variabel, yaitu persepsi potensi korupsi, integritas bisnis, integritas publik, dan sistem integritas lokal. Data diambil menurut persepsi responden, maka alat pengujiannya menggunakan metodologi non parametrik, yaitu *Rank Spearman Test*. Seluruh data menggunakan hasil Survei Persepsi Korupsi 2015 yang dilakukan oleh Lembaga *Transparency International* Indonesia.

Lembaga *Transparency International* Indonesia melakukan Survei Persepsi Korupsi 2015. Survei ini bertujuan untuk memetakan risiko korupsi dan menilai efektivitas program anti korupsi dalam rangka pencapaian target-target Stranas PPK. Secara lebih khusus, Survei Persepsi Korupsi 2015 bertujuan untuk mengumpulkan data antarwaktu dan antarkota yang dapat menggambarkan tentang daya saing dan hambatan berusaha; potensi korupsi dan integritas pelayanan publik; potensi suap dan integritas sektor bisnis, penilaian sistem integritas lokal, dan penilaian kinerja perekonomian daerah.

Survei Persepsi Korupsi dilaksanakan di sebelas kota di Indonesia dengan pertimbangan: 1) Propinsi dimana kota survei berada memiliki kontribusi terbesar dalam produk domestik bruto nasional; 2) Kontribusinya produk domestik regional bruto provinsi dimana kota survei berada secara akumulatif mencapai hampir 70 persen produk domestik bruto nasional dan 3) Kota-kota dipilih mempertimbangkan area persebaran kegiatan ekonomi sesuai metode zonasi atau kawasan. Yakni kawasan Indonesia bagian barat, tengah dan timur. Sesuai dengan kategori tersebut dipilih sebelas kota, yaitu adalah Kota Pekanbaru (1), Kota Semarang (2), Kota Banjarmasin (3), Kota Pontianak (4), Kota Makassar (5), Kota Manado (6), Kota Medan (7), Kota Padang (8), Kota Bandung (9), Kota Surabaya (10), dan Kota Jakarta Utara (11). Responden Survei Persepsi Korupsi 2015 adalah pengusaha. Pengusaha yang terpilih sebagai responden dalam survei ini adalah pengusaha yang memiliki pengalaman berinteraksi dengan minimal satu jenis pelayanan publik pusat, vertikal, propinsi, kota, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dalam dua belas bulan terakhir. Total sampel pengusaha yang terlibat dalam survei sebanyak 1,067 pengusaha. Perusahaan masuk dalam kategori kecil jika memiliki jumlah pekerja hingga kurang atau sama dengan 49 pekerja, perusahaan masuk dalam kategori menengah jika memiliki jumlah pekerja antara 50 hingga 99 pekerja, dan perusahaan masuk dalam kategori besar jika memiliki jumlah pekerja di atas 100 pekerja. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan *stratified random sampling*. Kerangka sampel pengusaha yang digunakan bersumber dari Direktori Perusahaan Industri 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik. Pengumpulan data Survei Persepsi Korupsi 2015 yang dilakukan oleh *Transparency International* Indonesia dibantu oleh koordinator wilayah survei serentak di sebelas kota di Indonesia pada bulan Mei – Juni 2015. (*Transparency International* Indonesia, 2015)

4. ANALISA DATA

Berikut tabel akumulasi data yang merupakan peringkat dari persepsi potensi korupsi, persepsi integritas bisnis, integritas publik dan sistem integritas lokal. Data-data ini digunakan untuk melihat hubungan antar variabel-variabel tersebut.

Tabel 1. Data Persepsi Korupsi, Persepsi Suap, Integritas Bisnis, Integritas Publik, Sistem Integritas Lokal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di 11 Kota Menurut Peringkat

No	Kota	Persepsi Korupsi	Integritas Bisnis	Integritas Publik	Sistem Integritas Lokal
1	Banjarmasin	1	5	6	5
2	Surabaya	2	4	9	1
3	Semarang	3	3	2	3
4	Pontianak	4	6	1	6
5	Medan	5	11	10	11
6	Jakarta Utara	6	7	7	8
7	Manado	7	8,5	8	2

8	Padang	8	8,5	4	7
9	Makassar	9	1	5	4
10	Pekanbaru	10	10	11	9
11	Bandung	11	2	3	10

Catatan: Peringkat paling rendah yang terbaik. Sumber: hasil olah data dari Transparency International Indonesia, 2015

Hasil pengujian hubungan antar variabelnya menggunakan *Rank Spearman*, memberikan luaran sebagai berikut:

Tabel 2. Korelasi antar Variabel

	Persepsi Korupsi	Integritas Bisnis	Integritas Publik	Sistem Integrasi Lokal
Persepsi Korupsi		0,050 tidak ada hubungan	0,055 tidak ada hubungan	0,482* korelasi lemah
Integritas Bisnis	0,050 tidak ada hubungan		0,583** korelasi kuat	0,415* korelasi lemah
Integritas Publik	0,055 tidak ada hubungan	0,583** korelasi kuat		0,127 tidak ada hubungan
Sistem Integrasi	0,482* korelasi lemah	0,415* korelasi lemah	0,127 tidak ada hubungan	

Sumber: hasil olah data menggunakan SPSS.

Dari hasil tes korelasi di atas terlihat bahwa terdapat beberapa hubungan antar variabel:

- Terdapat hubungan antara persepsi potensi korupsi dengan sistem integrasi lokal. Jika semakin rendah gap antara ekspektasi dan peran-kapasitas-tata kelola, semakin kuat sistem integritas lokal, maka terdapat persepsi yang lebih baik terhadap pemberantasan korupsi. Sebaliknya, semakin tinggi gap antara ekspektasi dan peran-kapasitas-tata kelola, semakin lemah sistem integritas lokal.
- Terdapat hubungan antara sistem integrasi lokal dengan persepsi integritas bisnis. Ekspektasi dan peran-kapasitas-tata kelola yang dirasa semakin baik akan menguatkan komitmen perusahaan dengan implementasi bisnis yang berintegritas.
- Terdapat hubungan antara persepsi integritas bisnis dengan integritas publik. Komitmen integritas bisnis dari pengusaha akan terbangun jika terdapat kepercayaan terhadap kesesuaian prosedur layanan dan implementasi layanan publik yang baik tanpa perlu dilakukan penyuaan.

5. KESIMPULAN

Dalam menumpas korupsi yang sudah sistemik sampai ke akar-akarnya, harus disadari perlu adanya pendekatan sistemik pula dalam upaya pemberantasan korupsi. Perlu dianalisa pemetaan sistemik lokal untuk mengetahui pilar mana berkontribusi paling besar memiliki peran, kapasitas, dan tata kelola dalam upaya pemberantasan korupsi. Dengan sistem integrasi lokal yang baik ini, pengusaha akan mampu mengurangi risiko bisnis dengan implementasi integritas dalam berbisnis. Dengan integritas yang baik dari pengusaha ini maka akan mendorong peningkatan integritas publik. Sebaliknya, semakin tinggi insiden penyuaan oleh pengusaha maka integritas publik akan semakin buruk. Terlihat bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dimulai dari integritas publik tetapi harus diawali dengan perbaikan sistem yang bersih. Temuan ini menunjukkan integritas publik memiliki relasi tidak langsung dengan potensi korupsi. Daerah dengan integritas publik yang buruk akan memiliki potensi korupsi yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2012). Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2012, Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia.
- Sulistyantoro, HT. (2004), *Etika Kristen dalam Menyikapi Korupsi*, Kompas, Senin, 2 Agustus 2004
- Guy J. Pauker (1980), *Indonesia 1979: The Record of Three Decades* (Asia Survey Vol XX No. 2)
- Hamzah, Andi, (1995), *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- KPK, (2006), *Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah Jakarta*: KPK
- Pope, Jaremy, (2003) *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional*, Jakarta: Yayasan Obormas Indonesia
- Transparency International Indonesia. (2015). *Survei Persepsi Korupsi 2015*, Danida.